

Menyoal Gaji Selangit Pejabat DKI

Awal tahun 2015, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menaikkan gaji selangit untuk para pejabat DKI Jakarta. Gaji tinggi tersebut karena pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) hampir dua kalilipat dari saat ini. Konon perbedaan dengan pemberian TKD sebelumnya bahwa sistem sekarang terbagi atas TKD Statis dan TKD Dinamis. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 19 triliun untuk gaji pegawai, dari total nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Dari Rp 19 triliun tersebut, anggaran belanja pegawai yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar Rp 10,2 triliun. Kenaikan gaji pegawai DKI Jakarta tersebut menambah rekor peningkatan gaji setiap tahun di DKI Jakarta



Dokumen : FITRA

Dibawah ini adalah catatan kritis dari hasil kajian FITRA mengenai gaji selangit pejabat DKI Jakarta :

1. Inovasi kenaikan gaji yang belum disertai dengan payung hukum yang jelas.

Kenaikan TKD didasarkan atas Pergub No.207 tahun 207 namun konsideran hukumnya juga belum jelas dan transparan. Secara khusus, pergub ini belum diunggah di web resmi pemprov DKI Jakarta. Secara umum, dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 Tahun 2014, Gaji dan Tunjangan diatur dalam pasal 79 dan 80, namun secara detail diamanatkan harus diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP). Sayangnya, kejelasan terkait PP yang dimaksud sampai sekarang masih dalam perencanaan dan belum disahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Politik Anggaran Pemprov DKI Jakarta lebih memihak pada birokrasi daripada rakyat.

Dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta 2013-2017, secara umum Proyeksi Kebijakan dan Proyeksi belanja sebagai berikut : 1). Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun; 2).Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan; 3)

Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional; 4) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang; 5). Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan; 6) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), pendampingan program-program pemerintah pusat, serta pendampingan program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional; 7). Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten hingga Provinsi; 8). Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Sesuai dengan dokumen tersebut maka proyeksi anggaran prioritas adalah sebagai berikut :

Berikut digambarkan Proyeksi Alokasi Belanja Daerah tahun 2013-2017 khusus untuk pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Prioritas I.

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Belanja Mengikat	10.853,15	12.236,92	13.797,13	15.556,26	17.539,69
B	Belanja Langsung (Prioritas I)	24.622,21	36.209,82	35.211,75	33.854,32	25.580,02
C	Pengeluaran Pembiayaan	4.403,56	5.105,98	3.900,79	3.301,50	922,69
1	Penyertaan Modal Pemerintah	4.403,56	5.105,98	3.900,79	3.301,50	922,69
2	Pembayaran Utang Pokok	58,19	-	-	-	-
Total (A+B)		39.878,91	53.552,72	52.909,67	52.712,08	44.042,40

Dan dalam APBD 2015 ada 13 program unggulan dengan rincian :

- Pengembangan sistem transportasi Rp 8,62 triliun.
- Peningkatan kualitas pendidikan Rp 5,74 triliun.
- Antisipasi banjir rob dan genangan Rp 3,33 triliun.
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Rp 3,25 triliun.
- Peningkatan sumber energi dan sumber daya mineral Rp 2,66 triliun.
- Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Rp 1,96 triliun.
- Peningkatan pelayanan publik Rp 1,90 triliun.
- Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kota Rp 1,78 triliun.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau Rp 1,77 triliun.
- Pembangunan budaya multikultur Rp 743,10 miliar.
- Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja sebesar Rp 497,05 miliar. - Pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda Rp 451,73 miliar.
- Pemanfaatan ruang kota Rp 152,91 miliar.

Jelas disebutkan dalam RPJMD dan proyeksi alokasi belanja anggaran bahwa, Pemerintah akan mendahulukan pelaksanaan program unggulan dan prioritas pembangunan, dan masalah

kenaikan gaji menjadi prioritas terakhir dan itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Namun yang terjadi saat ini adalah stagnasi dalam program prioritas, namun unggul dalam kenaikan gaji.

Nilai anggaran gaji pejabat 19 triliun ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah nilai 13 program pemerintah DKI Jakarta. Sehingga jelas bahwa politik anggaran pemerintah DKI saat ini lebih memihak Pejabat dan Birokrasi dibandingkan dengan prioritas kesejahteraan rakyat. Hal ini mengingkari RPJMD sebagai bentuk nyata janji politik saat kampanye.

3. Kinerja Pemprov DKI Jakarta masih belum memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Dalam RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 jelas disebutkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki (prioritas) dan belum teratasi. Faktanya, dalam data BPS DKI Jakarta 2014 disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta masih sebanyak 336,7 ribu orang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta masih sebesar 78,59 persen.
- Dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan daerah instansi Terlapor menunjukkan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah instansi penyelenggara pelayanan publik yang berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 541 laporan atau 10 persen dari total laporan seluruh Indonesia.
- Alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan banjir dari periode 2008-2014 sudah mencapai angka Rp 14 Triliun. Anggaran itu digunakan untuk pembebasan kanal banjir timur, pengendalian banjir, pengembangan sarana sistem drainase, pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendalian banjir, penataan situ, waduk dan saluran, dan peringatan dini banjir. Sayangnya, walaupun anggaran yang dikeluarkan begitu besar, belum dapat diketahui efektifitas penggunaan anggaran tersebut dalam mengatasi banjir Jakarta
- Penyerapan anggaran DKI yang rendah Anggaran yang tidak terserap masih diatas 10%, bahkan jika dirata-rata dari 2008 -2012 anggaran tidak terserap telah mencapai 20,3% Tingginya anggaran tidak terserap otomatis menjadi indikator rendahnya kinerja pemerintah sehingga tidak mampu merealisasikan seluruh program dengan baik. Rendahnya kinerja ini diakibatkan ketidakmampuan mengalokasikan anggaran dan tentu akan berdampak pula pada maksimalisasi pelayanan publik

4. Berpotensi kesenjangan terhadap daerah lain.

Saat ini problem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah masih terus terjadi. Posisi daerah Jakarta yang istimewa juga tidak lepas dari posisi keuangan daerah lain selain ibukota Negara. Keunggulan Jakarta dibandingkan dengan daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat setiap tahun dari 39,5 T(2013), 64,7 T(2014). Sedangkan untuk daerah diluar Jawa rata-rata masih mengandalkan DAK dan DAU.

Selain itu problematika infrastruktur di daerah juga menjadikan pemerintah daerah masih mempunyai pekerjaan rumah prioritas yang perlu dituntaskan selain masalah gaji yang biasanya memakan 40-50 persen dari total APBD. Sehingga perbedaan yang mencolok ini justru tidak akan menjadikan *rolemodel* bagi Jakarta, tetapi berpotensi akan menambah problematika keuangan daerah dengan tuntutan birokrasi di daerah.

5. Tidak serta merta dapat mengurangi korupsi, tanpa pengawasan.

Kenaikan gaji pejabat DKI yang melonjak tajam dimaksudkan oleh gubernur agar dapat mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun perlu dicatat bahwa, kenaikan yang gaji sesuai dengan UU ASN harus dilakukan secara berkala dan bertahap.

Selain itu perlu dicatat bahwa problem saat ini, remunerasi atau gaji tinggi saja tidak serta merta dapat menurunkan angka korupsi. Hingga saat ini juga belum ditemukan korelasi antara remunerasi dengan perbaikan reformasi birokrasi dan memangkas korupsi. Contoh Gayus Tambunan dengan rekening 25 M, Rekening Gendut Perwira Polri seperti Tersangka Budi Gunawan dan khusus di DKI Jakarta Udar Pristono dengan kasus bahwa Trans Jakarta merupakan bukti bahwa korupsi terjadi selain karena motivasi kebutuhan (need) tetapi juga karena keserakahan (greed). Nah, parahnya, penyakit birokrasi di Indonesia sudah menjangkit pada level korupsi *by greed*.

Rekomendasi

1. Menuntut Pemerintah DKI untuk membatalkan kenaikan gaji pejabat tinggi tanpa proses bertahap, lebih baik alokasi penghapusan dana honorarium dialokasikan untuk kebutuhan prioritas sesuai janji dan program kerja di RPJMD.
2. Menuntut kepada DPRD DKI Jakarta udah lebih tegas dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap APBD DKI Jakarta agar peningkatan anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas ini tidak terjadi lagi.
3. Menghimbau kepada Kemendagri untuk mereview dan mengkoreksi anggaran kenaikan gaji selangit pejabat DKI ini dan menunda penetapan APBD DKI.
4. Menuntut KemenPAN-RB segera membuat aturan terkait standarisasi remunerasi dan mengesahkan PP tentang aturan gaji tunjangan dan lainnya sesuai amanat UU ASN 2014, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan dengan antar daerah dalam hal gaji pegawai dan remunerasi.